

EVALUASI RENJA TRIWULAN IV 2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah.

Pangkalpinang, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja	2
1.4. Program dan Kegiatan	9
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021.....	10
2.1. Perbandingan antara program/kegiatan dalam Renja dan Renstra	10
2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/ Kegiatan Dalam Renja	15
BAB III KENDALA DAN SOLUSI.....	16
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	

LAMPPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin bahwa Rencana Kerja (Renja) 2021 telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam dokumen DPA. Pengendalian dan evaluasi terhadap renja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil Pengendalian dan evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan menjadi dasar untuk penyusunan Renja OPD tahun berikutnya agar tidak menyimpang dari Renstra.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan yang menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya laporan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan

Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV antara lain :

- a. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kinerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2021.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.

1.3. Sasaran , Program, Kegiatan Indikator Kinerja

Sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Outcome/Output
I	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	77
			Survey Kepuasan Payananan Internal	80
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	9 dokumen
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren Lainnya	5 dokumen
1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen)	4 dokumen
2		Kegiatan Admintrasi Keuangan	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	4
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Berkas
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan Bulanan/Triwulan/Semeteran yang disusun	4 Dokumen
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100%
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%

3.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%
4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100%
4.4		Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
4.5		Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
4.6		Penyediaan bahan/Material	Tingkat Ketersediaan Bahan/Material	100%
4.7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan	100%
4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang memadai	10 jenis
5.1		Pengadaan Mebel	Tingkat ketersediaan Mebel	100%
5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%
5.3		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terlaksana	2 unit
6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat	100%
6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor	100%

7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%
7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	100%
7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%
7.5		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%
II	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	5%
			Persentase Penyediaan Air Baku	0,11%
			Rasio Layanan Irigasi (%)	22,97%
1		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	2400 Hektar
			Volume Ketersediaan Air Baku (M3)	24000 M3
1.1		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun (Dokumen)	1 dokumen
1.2		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai (dokumen)	1 dokumen
1.3		Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha)	3 Hektar

1.4		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun (M')	70 Meter
1.5		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi /restorasi/pemeliharaan sungai (Km)	70 Km
1.6		Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelola SDA yang dibina dan diberdayakan	1 Lembaga
2		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan dikelola (Ha)	1686 Hektar
2.1		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen
2.2		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan (Ha)	366 Hektar
2.3		Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	luas jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan (Ha)	500 Hektar
2.4		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luasan daerah irigasi permukaan yang operasional dan dipelihara (Ha)	320 Hektar
2.5		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Luas Daerah jaringan irigasi rawa yang Operasional dan di pelihara (Ha)	500 Hektar
2.6		Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah lembaga pengelola irigasi yang beroperasi(lembaga)	1 Lembaga
III	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselesaikan	33%
1		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah kumulatif penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang ditetapkan	1 Unit
	1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi yang dilaksanakan	1 Unit

IV	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100%
1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	1 Dokumen
	1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungan	1 Dokumen
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)	91%
1		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan	18 Km
			Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan	753 Km
			Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan	3,54 Km
1.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan yang disusun	5 Dokumen
1.2		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	11,9 Km
1.3		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan menuju standar	19,5 Km
1.4		Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	7,85 Km
1.5		Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang Dipelihara secara Berkala	14,88 Km
1.6		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	695,79 Km
1.7		Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	15 Meter
1.8		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan Provinsi di Pulau Bangka yang dipelihara	3508,75 Meter
VI	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	50%
1		Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase sertifikasi tenaga ahli	42,13%

1.1		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih	30 Orang
2		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1 Penyelenggara
2.1		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan data dan informasi jasa konstruksi untuk SIPJAKI	2 Layanan
VII	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)	83%
1		Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Jumlah dokumen rencana tata ruang Propinsi yang ditetapkan	1 Dokumen
1.1		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen
1.2		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi, evaluasi, dan penetapan RRTR Provinsi	1 Dokumen
1.3		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Sosialisasi
2		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah provinsi	10 Penyelenggaraan
2.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	6 Pelanggaran
2.2		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4 Rekomendasi
VIII		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD	80
1		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100%
1.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (%)	100%
1.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100%
1.3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100%
1.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (%)	100%

1.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitasi Kunjungan (%)	100%
1.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100%
2		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10
2.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100%
2.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100%
2.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100%
3		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
3.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100%
3.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100%
3.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100%
I	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	50%
1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman	2 Unit
1.1		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi	2 Unit
I	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapan untuk kepentingan umum	67%
1		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang dapat diselesaikan	2 Sengketa
1.1		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah Provinsi yang diinventaris	2 Sengketa

1.2		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah provinsi yang dilaksanakan	2 Sengketa
II	Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah	1 Dokumen
1		Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	1 Laporan
1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah (kali)	6 Pertemuan

1.4. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman pada Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021 terdiri atas 11 Program, 22 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perbandingan antara program/kegiatan dalam renja dan renstra Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan Program Kegiatan Renstra dan Renja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4.4 Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	4.6	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material
	4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.1	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel
	5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan
	7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya
	1.2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
	1.3	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
	1.4	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
	1.5	Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai
	1.6	Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
	2.2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
	2.3	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
	2.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	2.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
	2.6	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Operasional Unit Pengelola Irigasi
III		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
	1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
IV		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pembangunan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	1.2	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan
	1.3	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar
	1.4	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan
	1.5	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan
	1.6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan
	1.7	Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan
	1.8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan

VI		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
	1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
	2.1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
VII		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
	1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
	1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
	1.3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
	2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
	2.2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
VIII		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
IX		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
X		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
XI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.1	Jumlah komponen instalasi listrik	Jumlah komponen instalasi listrik
	1.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 11 program, 22 kegiatan, 69 sub kegiatan dalam rencana strategis dan 11 program, 22 kegiatan, 69 sub kegiatan yang ada di rencana kerja tahun 2021.

2.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Program/Kegiatan/sub kegiatan Dalam Renja

Penyerapan keuangan program/kegiatan belanja langsung APBD Triwulan IV Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 267.367.445.627,52,- (83,98%) dari pagu Rp. 318.387.256.566. Evaluasi terhadap hasil renja triwulan IV dapat dilihat pada tabel evaluasi renja yang terlampir.

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

Kendala atau permasalahan yang ada pada pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa sub kegiatan dan paket pekerjaan yang tidak dapat terlaksana dan tidak selesai sehingga harus putus kontrak.

Saran dan tindak lanjut:

1. Mengevaluasi sub kegiatan yang tidak terlaksana dan paket pekerjaan yang putus kontrak untuk dianggarkan pada tahun selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi terhadap renja dinas pekerjaan umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 267.367.445.627,52 (83,98%) dari pagu Rp. 318.387.256.566. Yang harus dilakukan dalam meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya laporan evaluasi renja triwulan IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jantani Ali, ST
Nip. 19731022 200501 1 007

Evaluasi Hasil Terhadap Hasil Rencana Kerja - SKPD
Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan: Triwulan IV Tahun 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Restra SKPD pada tahun 2022 (Akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang di Evaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14=6 + 12		15 = 14/5x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakiq	80	64.478.645.128			77	23.596.194.980							9.376.988.109	77,55	8.160.184.197	77,55	17.537.172.306	100,71	74	77,55	17.537.172.306	96,94	27,20		
			Survey Kepuasan Payananan Internal	85				80									80,00											
1	1 03 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	28	401.480.881			9	666.295.148	3,00	4,00			3	22.393.950		216.362.254	10,00	238.756.204	111,11	35,83	10,00	238.756.204	35,71	59,47			
1.1	1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Jumlah Renstra, Jumlah RKA, Jumlah DPA, Jumlah Dokren Lainnya	10	1.537.500.000			5	400.560.142					4,00	4.454.750	1	71.174.994,00	5,00	75.629.744	100,00	18,88	5,00	75.629.744	50,00	4,92			
1.2	1 03 01 1.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dalev, Jumlah LPPD, Jumlah LAKIP, Jumlah LKPJ (dokumen)	8	401.480.880,6			4	265.735.006					3,00	17.939.200,00	1	145.187.260,00	4,00	163.126.460	100,00	61,39	4,00	163.126.460	50,00	40,63			
2	1 03 01 1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	8	49.777.715.047			4	16.400.856.533							7.971.621.000	4	4.549.800.196	4,00	12.521.421.196	100,00	76,35	4,00	12.521.421.196	50,00	25,15		
2.1	1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	24	49.731.631.625			12	16.336.083.029					9	7.971.621.000	3	4.549.800.196,00	12,00	12.521.421.196	100,00	76,65	12,00	12.521.421.196	50,00	25,18			
2.2	1 03 01 1.02 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan semesteran	Jumlah layanan yang diselenggarakan	8	46.083.422			4	64.773.504					4				4,00	0	100,00	-	4,00	0	50,00	0,00			
3	1 03 01 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	100	314.183.000			100	137.523.000							100	51.197.775	100,00	51.197.775	100	37,23	100,00	51.197.775	100,00	16,30			
3.1	1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	184.500.000			100	82.408.000							100	41.500.975	100,00	41.500.975	100,00	50,36	100,00	41.500.975	100,00	22,49			
3.2	1 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	129.683.000			100	55.115.000							100	9.696.800	100,00	9.696.800	100,00	17,59	100,00	9.696.800	100,00	7,48			
4	1 03 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100	1.397.162.307			100	575.773.648							78.940.300	100	193.715.657	100,00	272.655.957	100,00	47,35	100,00	272.655.957	100,00	19,51		
4.1	1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	174.235.416			100	112.188.847					35,00	5.569.000	65	7.560.000	100,00	13.129.000	100,00	11,70	100,00	13.129.000	100,00	7,54			
4.2	1 03 01 1.06 04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	-			100	39.681.172					35,00	8.391.900,00	65	8.303.000,00	100,00	16.694.900	100,00	42,07	100,00	16.694.900	100,00	#VALUE!			
4.3	1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	100	47.867.500			100	17.689.000					35,00	3.461.500	65	2.268.000	100,00	5.729.500	100,00	32,39	100,00	5.729.500	100,00	11,97			
4.4	1 03 01 1.06 05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	118.899.391,00			100	41.994.985					50,00	11.917.000	50	12.378.600	100,00	24.295.600	100,00	57,85	100,00	24.295.600	100,00	20,43			
4.5	1 03 01 1.06 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	51.250.000,00			100	15.200.000					35,00	4.358.500	65	5.620.000	100,00	9.978.500	100,00	65,65	100,00	9.978.500	100,00	19,47			
4.6	1 03 01 1.06 06	Penyediaan bahan/Material	Tingkat Ketersediaan Bahan/Material	100				100	36.224.644							100	11.058.500	100,00	11.058.500	100,00	30,53	100,00	11.058.500	100,00	#VALUE!			
4.7	1 03 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan	100	126.075.000			100	61.500.000					65,00	22.385.000	35	32.310.000	100,00	54.695.000	100,00	88,93	100,00	54.695.000	100,00	43,38			
4.8	1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	878.835.000			100	251.295.000					55,00	22.857.400	45	114.217.557	100,00	137.074.957	100,00	54,55	100,00	137.074.957	100,00	15,60			
5	1 03 01 1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang memadai	20	6.495.422.305			10	3.212.951.991					10	576.161.520		2.146.662.480	10,00	2.722.824.000	100,00	84,75	10,00	2.722.824.000	50,00	41,92			
5.1	1 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tingkat ketersediaan Mebel	100	70.838.066			100	234.555.154									0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	Tidak terlaksana		
5.2	1 03 01 1.07 07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	1.407.506.622			100	865.978.702					45,00	107.250.000	55	601.511.800	100,00	708.761.800	100,00	81,85	100,00	708.761.800	100,00	50,36			
5.3	1 03 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terlaksana	2	5.017.077.817			2	2.112.418.135					1,00	468.911.520	1	1.545.150.680	2,00	2.014.062.200	100,00	95,34	2,00	2.014.062.200	100,00	40,14			

6	1	03	01	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	200	4.083.910.015	100	1.852.734.772					681.111.091	100	873.269.325	100,00	1.554.380.416	100,00	83,90	100,00	1.554.380.416	50,00	38,06																				
6.1	1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat	100	275.905.015	100	104.434.772			50,00	18.690.000	50	28.833.000	100,00	47.523.000	100,00	45,50	100,00	47.523.000	100,00	17,22																				
6.2	1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	188.805.000	100	359.200.000			45,00	94.021.091	55	81.736.325	100,00	175.757.416	100,00	48,93	100,00	175.757.416	100,00	93,09																				
6.3	1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor	100	3.619.200.000	100	1.389.100.000	0,00	0,00	65,00	568.400.000	35	762.700.000	100,00	1.331.100.000	100,00	95,82	100,00	1.331.100.000	100,00	36,78																				
7	1	03	01	1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.008.771.573	100	750.059.888				46.760.248	100	128.176.510	100,00	175.936.758	100,00	23,46	100,00	175.936.758	100,00	8,76																					
7.1	1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100	774.674.500	100	390.523.756			58,00	32.980.248	42	55.726.010	100,00	88.706.258	100,00	22,71	100,00	88.706.258	100,00	11,45																				
7.2	1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara	100	256.249.861	100	102.515.682			45,00	11.950.000	55	66.905.500	100,00	78.855.500	100,00	76,92	100,00	78.855.500	100,00	30,77																				
7.3	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	922.498.565	100	201.379.750			100,00				100,00	0	100,00	-	100,00	0	100,00	0,00																				
7.4	1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	55.348.647	100	55.640.700			35,00	1.830.000	65	6.545.000	100,00	8.375.000	100,00	15,05	100,00	8.375.000	100,00	15,13																				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				97,24	74,32			83,83	29,51																				
Predikat Kinerja																				ST	S			T	SR																				
II	1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	6,25	104.609.972.750		5	32.519.078.155			3,93	10.125.296.280		10.125.296.280	3,93	20.250.592.560	78,60	62,27	3,93	20.250.592.560	62,88	19,36																				
						Persentase Penyediaan Air Baku	0,12			0,11				0				0,00	0	0,00		0,00	0	0,00																					
						Rasio Layanan Irigasi (%)	38,81			22,97				22,97				22,97	0	100,00		22,97	0	59,19																					
1	1	3	2	1.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	3000	55.524.475.500		2400	13.709.390.986				1.803.988.750		3.415.724.198	0,00	5.219.712.948	-	38,07	0,00	5.219.712.948	0,00	9,40																				
						Volume Ketersediaan Air Baku (M3)	27000			24000																	Sub Kegiatan Pembangunan embung dan Penampung air lainnya difocusing																		
1.1	1	3	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Lainnya yang disusun (Dokumen)	3	937.321.500		1,00	169.336.567				92.198.000	0,00	92.198.000	-	54,45	0,00	92.198.000	0,00	9,84																					
1.2	1	3	2	1.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai (dokumen)	5	1.588.196.500		1,00	173.680.399				75.670.000	0,00	75.670.000	-	43,57	0,00	75.670.000	0,00	4,76																					
1.3	1	3	2	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas tampungan kolam retensi/Kapasitas Polder (Ha)	3,9	25.626.394.000		3,00	9.999.311.948			1.361.129.250	1,7	2.399.614.698	1,70	3.760.743.948	56,67	37,61	1,70	3.760.743.948	43,59	14,68																				
1.4	1	3	2	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun (M)	170	1.874.274.000		70,00	390.034.237			106.513.500	30	258.884.500	30,00	365.398.000	42,86	93,68	30,00	365.398.000	17,65	19,50		terjadi refofusing anggaran, target tidak diubah tetapi pagu anggaran berkurang																		
1.5	1	3	2	1.01	46	Normalisasi/Restoresi Sungai	Panjang normalisasi/restoresi/pemeliharaan sungai (Km)	157	7.978.682.000		70,00	2.852.548.942			336.346.000	17,71	589.357.000	17,71	925.703.000	25,30	32,45	17,71	925.703.000	11,28	11,60																				

																			Predikat Kinerja		ST	R			R	SR				
VIII	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	100,00	2.662.339.933			50,00	2.654.672.652					283.898.300	50	1.138.417.679	50,00	1.422.315.979	100,00	53,58	50,00	1.422.315.979	50,00	53.424			
1	1	04	05	1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman	4,00	2.662.339.933			2,00	2.654.672.652					283.898.300	2	1.138.417.679	2,00	1.422.315.979	100,00	53,58	2,00	1.422.315.979	50,00	53.424			
1.1	1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang difasilitasi	4	2.662.339.933			2,00	2.654.672.652				283.898.300	2	1.138.417.679	2,00	1.422.315.979	100,00	53,58	2,00	1.422.315.979	50,00	53.424			
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	53,58			50,00	53,42		
																			Predikat Kinerja		ST	R			R	SR				
IX	2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapan untuk kepentingan umum	100,00	61.500.000			67,00	65.427.119									67,00	11,62	67,00	7.600.000	67,00	12,36				
1	2	10	04	1.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang dapat diselesaikan	3,00	61.500.000			2,00	65.427.119						2	7.600.000	2,00	7.600.000	100,00	11,62	2,00	7.600.000	66,67	12,36		Putusan pengadilan terkait pembayaran ganti rugi tahun 2021 dan	
1.1	2	10	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah Provinsi yang inventarisasi	3	41.000.000			2	35.442.638					2	4.100.000	2,00	4.100.000	100,00	11,57	2,00	4.100.000	66,67	10,00			
1.2	2	10	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah provinsi yang dilaksanakan	3	61.500.000			2	29.984.481					2	3.500.000	2,00	3.500.000	100,00	11,67	2,00	3.500.000	66,67	5,69			
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	11,62			66,75	10,10		
																			Predikat Kinerja		ST	SR			S	SR				
X	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah	1,00	574.000.000			1,00	230.738.390									1,00	86,71	1,00	200.070.279	100,00	34,86				
1	2	10	10	1.01	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	1,00	574.000.000			1,00	230.738.390						1	200.070.279	1,00	200.070.279	100,00	86,71	1,00	200.070.279	100,00	34,86			
1.1	2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan lahan (ka)	6	574.000.000			6	230.738.390					6	200.070.279	6,00	200.070.279	100,00	86,71	6,00	200.070.279	100,00	34,86			
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	86,71			100,00	34,86		
																			Predikat Kinerja		ST	T			ST	SR				
XI	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD	85,00	1.590.913.570			80,00	551.502.143					144.484.403	80,00	242.035.507	80,00	386.519.910	100,00	70,08	80,00	386.519.910	94,12	24,30			
1	1	03	01	1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	100,00	152.372.238			100,00	62.651.921					600.000	100	20.901.622	100,00	21.501.622	100,00	34,32	100,00	21.501.622	100,00	14,11			
1.1	1	03	01	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (%)	100	7.681.217			100	3.746.935					100	3.744.300	100,00	3.744.300	100,00	99,93	100,00	3.744.300	100,00	48,75			
1.2	1	03	01	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Bahan Logistik Kantor (%)	100	6.375.500			100	1.740.000		40			60	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	57,47	100,00	1.000.000	100,00	15,69			
1.3	1	03	01	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan (%)	100	6.252.471			100	3.049.986					100	1.960.000	100,00	1.960.000	100,00	64,26	100,00	1.960.000	100,00	31,35			
1.4	1	03	01	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (%)	100	4.100.000			100	1.200.000		35	600.000	65	600.000	100,00	1.200.000	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200.000	100,00	29,27			
1.5	1	03	01	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kunjungan (%)	100	35.875.000			100	14.030.000						0,00	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
1.6	1	03	01	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat ketersediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	100	92.088.050			100	38.885.000					100	13.597.322	100,00	13.597.322	100,00	34,97	100,00	13.597.322	100,00	14,77			

2	1	03	01	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20	1.032.830.016		10	303.777.643					117.631.029	10	150.037.916	10,00	267.668.945	100,00	88,11	10,00	267.668.945	50,00	25,92																							
2.1	1	03	01	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat ketersediaan layanan administrasi surat menyurat (%)	100	71.175.016		100	32.877.643		30,00	1.500.000	70	26.841.050	100,00	28.341.050	100,00	86,20	100,00	28.341.050	100,00	39,82																								
2.2	1	03	01	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	100	188.805.000		100	38.900.000		50,00	29.131.029	50	7.196.866	100,00	36.327.895	100,00	93,39	100,00	36.327.895	100,00	19,24																								
2.3	1	03	01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tingkat ketersediaan pelayanan umum kantor (%)	100	772.850.000		100	232.000.000		45,00	87.000.000	55	116.000.000	100,00	203.000.000	100,00	87,50	100,00	203.000.000	100,00	26,27																								
3	1	03	01	1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	405.711.316		100	185.072.579			26.253.374	100	71.095.969	100,00	97.349.343	100,00	52,60	100,00	97.349.343	100,00	23,99																								
3.1	1	03	01	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (%)	100	251.965.500		100	115.400.250		35,00	26.253.374	65	9.635.000	100,00	35.888.374	100,00	31,10	100,00	35.888.374	100,00	14,24																								
3.2	1	03	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tingkat ketersediaan pemeliharaan peralatan dan mesin yang terpelihara (%)	100	51.245.816		100	19.672.329				100	11.734.969	100,00	11.734.969	100,00	59,65	100,00	11.734.969	100,00	22,90																								
3.3	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (%)	100	102.500.000		100	50.000.000				100	49.726.000	100,00	49.726.000	100,00	99,45	100,00	49.726.000	100,00	48,51																								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				93,75	70,08			90,26	24,94																								
Predikat Kinerja																				ST	S			T	SR																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																																	
											318.387.256.566,00																																						
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																				90,25	71,36			65,85	32,35																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				T	S			R	SR																								
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																																																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Trivulan berikutnya :																																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																																	

